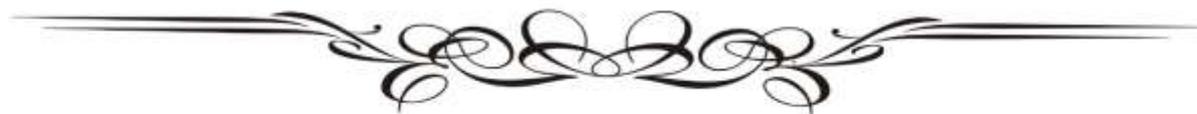


# **KLIPPING BERITA MEDIA MASSA**



**Kamis, 27 Juni 2019**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 27 Juni 2019	Proyek Umbulan Rampung Tahun Ini	Proyek sistem penyediaan air minum yang terbesar di Indonesia. Saat ini progress pembangunan telah mencapai 77,06%
2	Kompas (Halaman 7)	Kamis, 27 Juni 2019	Opini	Arsitek Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
3	Kompas (Halaman 13)	Kamis, 27 Juni 2019	Puncak Gunung Es	Jembatan ambruk yang menerima beban melebihi daya tampung dari kendaraan yang melintas
4	Kompas (Halaman 15)	Kamis, 27 Juni 2019	Lahan untuk Embung Beralih Fungsi	Pembangunan Embung pengendali banjir di Samarinda terkendala keberadaan permukiman
5	Kompas (Halaman 15)	Kamis, 27 Juni 2019	Revitalisasi Butuh Kolaborasi Lintas Sektor	Untuk penanganan Danau Limbto di Gorontalo yang terancam hilang menjadi daratan akibat sedimentasi yang terus terjadi tak teratasi
6	Kompas (Halaman 20)	Kamis, 27 Juni 2019	Utamakan Pemenuhan Kebutuhan Sungai	Penataan kawasan Sungai Ciliwung di Jakarta guna menekan resiko banjir mesti mendahulukan kebutuhan sungai dibanding tempat tinggal di area sungai
7	Republika (Halalamn 4)	Kamis, 27 Juni 2019	Bappenas: Beban Jakarta Terlalu Berat	Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa akan mengancam ketahanan pangan Indonesia
8	Media Indonesia (Hal. 11)	Kamis, 27 Juni 2019	Elevasi Waduk Turun Ribuan Ha Padi Puso	Sejumlah daerah mengalami kekeringan serius, tanaman padi dilaporkan lebih dari 2000 hektare puso

Judul	Proyek Umbulan Rampung Tahun Ini	Tanggal	Kamis, 27 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Proyek sistem penyediaan air minum yang terbesar di Indonesia. Saat ini progress pembangunan telah mencapai 77,06%		

► AIR MINUM

# Proyek Umbulan Rampung Akhir Tahun Ini

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan proyek sistem penyediaan air minum Umbulan bakal rampung pada kuartal IV/2019.

Kabupaten Pasuruan, PDAM Delta Tirta Sidoarjo, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik.

"Kesiapan *offtake* sudah disiapkan sesuai dengan tahapan penyerapan yang ditetapkan. Penyerapan masing-masing penerima [*offtake*] berbeda-beda," jelasnya kepada *Bisnis*, Rabu (26/6).

Oscar menjabarkan, duniya penyerapan air oleh PDAM Tirta Dharma Kota Pasuruan, PDAM Kabupaten Pasuruan dan PDAM Delta Tirta Sidoarjo dijadwalkan berlangsung secara bertahap selama 4 tahun.

Sementara itu, duniya penyerapan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik masing-masing 2 tahun dan 3 tahun.

Pengisahan SPAM Umbulan sudah dimulai pada 1986. Dalam rentang hampir 30 tahun, berbagai upaya pelanggan tidak membuahkan hasil sampai pada 2011 kepastian proyek mulai tampak.

Saat itu, Pengprov Jawa Timur membuka tahap pra-kualifikasi pengisahan SPAM Umbulan.

Lima tahun berselang, konsorsium PT Medco Energi Internasional Tbk dan PT Bangun Tjipta memenangi

lelang dan membentuk MATU.

SPAM Umbulan menelan investasi Rp2,05 triliun dan dukungan kelayakan atau *viability gap fund* sebesar Rp818 miliar.

Proyek ini juga mendapat penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Berdasarkan catatan *Bisnis*, proyek ini menjadi tonggak keberhasilan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha di proyek air minum karena melibatkan banyak instansi di lintas sektor.

Dalam proyek ini, EPPSPAM sejak awal terlibat dalam pendampingan dan penyusunan perencanaan studi kelayakan, desain teknis, rencana bisnis, hingga hingga perjanjian jual beli air antara PDAB dan PDAM.

Kementerian PUPR juga membangun pipa dari titik *offtake* sampai ke distribusi utama dengan biaya Rp400 miliar.

Sementara itu, selain pemberian VGF, Kemenkeu juga memberi penjaminan lewat PII dan penyalpan serta pelaksanaan transaksi proyek melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). SMI dan PT Indonesia Infrastructure Finance juga memberi pembiayaan sindikasi senilai Rp840 miliar. □



## Profil Proyek SPAM Umbulan

- Pemanggang jawab proyek kerja sama: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Badan usaha pelaksana: PT Meta Adhya Tirta Umbulan
- Pemakai: PDAM Tirta Dharma Kota Pasuruan, PDAM Kabupaten Pasuruan, PDAM Delta Tirta Sidoarjo, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya & PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik.
- Sistem produksi: intake, instalasi pengolahan air 4.000 liter per detik, rumah pompa, reservoir
- Sistem transmisi: Pipa transmisi 93 kilometer, rumah pompa, meter induk
- Sistem *offtake*: 16 unit *offtake* di lima kabupaten/seka
- Investasi: Rp2,05 triliun
- Bantuan VGF: Rp818 miliar
- Masa konstruksi: 25 tahun sejak penyelesaian konstruksi

Sumber: Kementerian PUPR, dan

INDUSTRY DO

Rivvi Maulana  
rivvi.maulana@kons.com

Sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan di Pasuruan, Jawa Timur sejauh ini merupakan proyek air minum dengan kapasitas paling besar di Indonesia.

Radan Peningkatan Penyelenggaraan SPAM Kementerian PUPR mencatat, hingga Mei 2019, progres pembangunan SPAM Umbulan telah mencapai 77,06%.

► Hingga Mei 2019, progres pembangunan SPAM Umbulan telah mencapai 77,06%.

► SPAM Umbulan menelan investasi Rp2,05 triliun.

Kepala Bagian Pelayanan Informasi & Kerjasama EPPSPAM Oscar Slagian mengatakan bahwa saat ini badan usaha pelaksana, yaitu PT Meta Adhya Tirta Umbulan (MATU) masih mengerjakan pemasangan pipa jaringan distribusi utama.

Proyek SPAM Umbulan telah memulai tahap konstruksi pada Juli 2017. Pembangunan SPAM berkapasitas 4.000 liter per detik ini direncanakan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Setelah rampung, air yang diolah dari mata air Umbulan di Pasuruan bakal disalurkan ke 310.000 sambungan rumah atau setara 1,30 juta jiwa.

Oscar menuturkan bahwa ada lima perusahaan daerah air minum (PDAM) yang menjadi *offtake* atau pembeli air yang diproduksi oleh MATU.

Kelima pembeli itu yakni PDAM Tirta Dharma Kota Pasuruan, PDAM

Judul	Opini	Tanggal	Kamis, 27 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 7)		
Resume	Arsitek Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik		

# Arsitektur Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Dedi Haryadi  
 Staf Ahli Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi

Ada satu aksi nasional strategis yang digagas Presiden Joko Widodo, tetapi belum banyak diketahui publik, yaitu mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Inisiatif ini kalah populer ketimbang pembangunan jalan tol, bendungan, padat karya di perdesaan, perubahan sosial atau sertifikasi lahan dan lain-lain.

Pada, kalau melihat tujuannya, aksi ini lebih substansial. Tujuan yang ingin dicapai aksi ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di pusat dan di daerah plus pengendalian risiko korupsi. Dalam tulisannya "Melawan Korupsi dengan Teknologi" (*Kompas*, 18/3/2019), Yana Nugroho meyakini teknologi informasi bisa digunakan untuk mengatasi korupsi.

Kalau itu tercapai, pertumbuhan ekonomi akan lebih berkualitas. Boleh jadi, laju pengurangan kemiskinan akan lebih cepat, laju penciptaan lapangan kerja akan lebih tinggi dan kesenjangan ekonomi antar-golongan masyarakat akan lebih cepat menyempit. Dengan demikian, upaya ini akan lebih mendekatkan kita pada tujuan bernegara.

Nantinya tidak ada lagi cerita tentang program atau kegiatan yang muncul seketika dalam

APBN/APBD seperti halnya program e-KTP yang kemudian jadi skandal megalokrupsi; program yang mangkrak seperti mesin parkir di Kota Bandung atau program penanganan *stunting* tetapi tak ada kalori, vitamin atau protein yang menetes secuil pun pada anak balita yang kurang gizi dan asupan, seperti di Jawa Barat.

## Ukuran dan kriteria keberhasilan

Yang jadi ukuran keberhasilan aksi ini, di antaranya (1) berfungsi koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran di pusat, (2) berfungsi koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran di daerah, (3) berfungsi koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik pusat dengan daerah, dan (4) terselenggaranya trilateral anggaran dan kinerja di Kementerian dan lembaga. Sementara kriteria keberhasilannya adalah terwujudnya interoperabilitas sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik dan meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gagasan ini bagian integral dari 11 aksi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas Pencegahan Korupsi. Informasi detail aksi ini ada dalam Surat Keputusan Bersama Lima Pemimpin Lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappenas, Kemendagri, Kantor Staf Presiden dan Kementerian dan Reformasi Birokrasi. Inisiatif ini juga bagian tak terpisahkan dari dua beleid lain yang saling terkait, yaitu Perpres No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan PP No 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Beleid yang teralhir ini—PP No 17/2017—merupakan iktikar pemerintah mengatasi problem melenakan, yaitu tak sinkron, tak sinergis, dan terputusnya proses perencanaan serta penganggaran di pusat, di daerah dan antara

pusat dan daerah. Inilah yang menyebabkan inefisiensi, inefektivitas dan tingginya risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran di pusat dan daerah.

## Integrasi berjenjang

Terwujudnya interoperabilitas sistem perencanaan dan penganggaran (*budgeting*) berbasis elektronik—untuk mudahnya selanjutnya kita sebut saja sistem *e-plageting*—dan meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran akan tercapai kalau ada integrasi perencanaan dan penganggaran berjenjang secara elektronik, yakni (1) integrasi horizontal *e-plageting* di pusat, (2) integrasi horizontal *e-plageting* di daerah, dan (3) integrasi vertikal *e-plageting* pusat dengan daerah. Integrasi horizontal *e-plageting* di pusat itu disuplementasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan (pertanggungjawaban).

Ada proses penting dalam proses integrasi horizontal ini, yaitu standarisasi Bagas Akun Standar (BAS) dan harmonisasi proses bisnis perencanaan dan penganggaran berbagai kementerian dan lembaga. BAS merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Dua institusi yang penting dan instrumental dalam proses integrasi horizontal di pusat ini adalah Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Bappenas.

Integrasi horizontal di daerah, kendati lebih kompleks, kurang lebih akan melalui proses yang sama, hanya lembaga yang penting dan instrumental perannya berbeda; Kemkeu dan Kemendagri. Kalau integrasi horizontal *e-plageting* di pusat dan di daerah sudah terjadi, relatif lebih mudah memastikan terjadinya integrasi vertikal *e-plageting* pusat dengan daerah.

Menyatukan dan memadukan integrasi *e-plageting* semua jenjang itu ke dalam model



aplikasi mengantar kita pada satu imaji tentang arsitektur *e-plageting* nasional. Bagaimana arsitektur *e-plageting* nasional itu? Dari mana kita memulai membangun arsitektur *e-plageting* nasional? Syarat pokok apa yang harus ada supaya *e-plageting* meujud?

## Kriteria dan kondisi

Ada beberapa kriteria yang dirumuskan koalisi, supervisi dan pencegahan (konsupgah) KPK kalau kita mau mengembangkan arsitektur *e-plageting* nasional. (1) model pengembangannya harus *open source*, (2) mampu diintegrasikan ke dan dari aplikasi lainnya, (3) mampu menampung berbagai informasi keuangan (komprehensif), (4) dukungan teknisnya mesti se-Indonesia (*service availability*),

(5) kemampuan, (6) biaya rendah, kalau bisa gratis lebih baik, (7) lokasi datanya *cloud*, (8) pemutakhiran datanya mesti *real time*, (9) perangkat lunaknya mampu digunakan berbagai mesin/sistem (*portability data*), dan (10) perangkat lunaknya mampu mengagregasi data secara nasional. Selain itu ada dua kriteria lain yang sangat penting, yaitu (11) keamanan sistem informasinya yang tinggi. Ini menyangkut kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, kesinambungan dan ketersediaan data dan informasi, dan (12) kapasitas organisasi dan keandalan modal manusianya memadai.

Beberapa aplikasi perencanaan dan penganggaran yang ada sekarang ini, baik di pusat maupun di daerah, sudah memenuhi sebagian kriteria itu. Jadi, sebenarnya kita tidak me-

mulai ini dari nol. Misalnya, aplikasi *e-plageting* Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) yang dikembangkan Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPPT) sudah berbasis *cloud* dan model pengembangannya juga sudah *open source*.

Aplikasi *e-plageting* Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perangkat lunaknya mampu digunakan di berbagai sistem/mesin dan juga sudah banyak dipakai oleh pemerintah daerah. Sampai Oktober 2018, Simda BPKP sudah digunakan oleh 375 pemda. Sementara Simral sudah digunakan oleh 16 pemda. Aplikasi *e-plageting* Pemerintah Kota Surabaya juga sudah memenuhi sebagian kriteria tersebut, di antaranya konektivitasnya sudah *online* dan tidak ada biaya pemeliharaan.

Aplikasi *e-plageting* di Surabaya sukses mengefisienkan, mengefektifkan, dan mengendalik korupsi dalam pengelolaan APBD. Dana APBD yang berhasil difisienkan bisa dialokasikan dan digunakan untuk membiayai pelayanan pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha kecil bagi kelompok masyarakat miskin. Inovasi digitalisasi pengelolaan APBD Pemkot Surabaya ini mengantarkan Tri Rismaharini mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Awards (BHACA). Selain itu, pada Oktober 2013, Pemkot Surabaya juga mendapatkan penghargaan Future Government Awards se-Asia-Pasifik dalam dua kategori, yaitu pusat data dan inklusi digital.

Di tingkat desa, BPKP juga mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini selain membantu aparat desa mengelola keuangan desa juga membantu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawasi pengawasan pengelolaan keuangan desa. Saat ini, BPKP juga sedang mengembangkan aplikasi lain, Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakedes).

Di lingkungan instansi pemerintah pusat juga ada beberapa aplikasi perencanaan dan penganggaran. Bappenas mengembangkan aplikasi *e-planning*, Krisna dan Krisna Selaras. Krisna Selaras adalah aplikasi untuk meningkatkan sinergi perencanaan pemerintah pusat dengan pemda. Kemkeu mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) yang mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja, dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

Selain Sakti, di Kemkeu ada juga Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan). Selain untuk memonitor transaksi, aplikasi ini juga untuk menyajikan informasi yang akurat, lengkap, dan detail mengenai pelaksanaan sistem pengelolaan perbendaharaan dan anggaran negara. Saat ini sedang dikembangkan inisiatif mengintegrasikan aplikasi Omspan dengan aplikasi Siskeudes. Tapi isu dan agenda utamanya terkait integrasi horizontal di lingkungan pemerintah pusat adalah bagaimana mengintegrasikan aplikasi Krisna dan Sakti.

## Audit "e-plageting"

Eksistensinya beragam aplikasi *e-plageting* di pusat dan daerah setidaknya menyajikan tiga alternatif dalam membangun arsitektur *e-plageting* nasional, yaitu (1) membangun aplikasi tunggal pengelolaan keuangan pusat dan daerah, (2) memilih salah satu aplikasi perencanaan dan penganggaran yang sudah ada saat ini yang dikembangkan dan digunakan oleh pemerintah

pusat dan daerah dengan sejumlah perbaikan, dan (3) membangun interoperabilitas aplikasi yang sudah ada saat ini.

Alternatif mana yang mau diambil? Apa implikasinya kalau, misalnya, alternatif nomor dua atau nomor tiga yang diambil? Untuk menjawab kedua pertanyaan itu saat ini BPPPT sedang melakukan audit/penilaian aplikasi *e-plageting*. Selain diminta Stranas PK/KPK, Perpres No 95/2018 tentang SPBE memang memberikan mandat kepada BPPPT untuk mengaudit teknologi aplikasi.

Penilaian ini dirancang bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk perbaikan aplikasi *e-plageting* yang ada. Yang ingin diungkap lewat kegiatan audit ini, di antaranya kesesuaian teknologi aplikasi yang diaudit dengan aturan, standar, atau prosedur yang berlaku; kesesuaian dengan rencana, perkiraan atau kebutuhan; efektivitas, efisiensi, kelemahan dan kekuatan teknologi aplikasi yang diaudit. Audit ini baru saja dimulai, mungkin dalam 4-6 bulan ke depan hasilnya baru kita dapatkan.

Iktikar membangun arsitektur *e-plageting* nasional itu lebih politis ketimbang teknis. Lebih banyak dibutuhkan kesepakatan dan konsensus antar-lembaga/aktor ketimbang membuat perangkat lunaknya. Bayangkan kalau Kemkeu dengan Bappenas atau Kemkeu dengan Kemendagri tak harmonis? Dapat dipastikan integrasi horizontal *e-plageting* di pusat dan di daerah itu tak akan pernah terjadi. Ego sektoral dan vested interest itu masih kuat bercekok, jangankan antara kementerian/lembaga, dalam satu direktorat di kementerian yang sama saja masih persisten.

Oleh karena itu, mengharmoniskan dan mengintegrasikan pola pikir, visi ke depan, dan kepentingan antarlembaga/aktor harus diutamakan. Sayangnya belum ada aplikasi yang bisa digunakan untuk mengharmoniskan dan mengintegrasikan pola pikir, visi, dan kepentingan orang.

Judul	<b>Puncak Gunung Es</b>	Tanggal	Kamis, 27 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 13)		
Resume	Jembatan ambruk yang menerima beban melebihi daya tamping dari kendaraan yang melintas		

## INFRASTRUKTUR

# Puncak Gunung Es

Pada 17 Juni 2019, Jembatan Way Mesuji di jalan lintas timur Sumatera, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Lampung, ambles. Dua truk bermuatan semen dan sawit terjebak di tengah jembatan.

Peristiwa ini membawa ingatan kita pada kejadian serupa di Jawa Timur. Pada 17 April 2018, Jembatan Cincin Lama yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan ambruk. Pada 2016, kendaraan berat yang melintasi Jembatan Tol Cisomang di ruas Tol Purbaleunyi, Jawa Barat, dibatasi. Pada jembatan itu ditemukan pergeseran pilar sehingga pilar perlu diperkuat. Penguatan fondasi dan pilar diharapkan dapat menghentikan pergeseran yang terjadi.

Meskipun peristiwa tersebut tidak terjadi pada lokasi dan waktu yang sama, ada satu benang merahnya, yakni kendaraan dengan muatan dan ukuran berlebih atau *over dimension over load*.

Di Jembatan Way Mesuji, kepolisian menyatakan, kekuatan jembatan hanya dapat menahan beban maksimal 30 ton. Sementara bobot dua truk bermuatan semen dan sawit di atasnya 60 ton. Di Jembatan Cincin Lama, beban tiga truk yang terperosok di jembatan itu diperkirakan 130 ton. Bobot dan berat kendaraan yang melintas di atas jembatan itu jauh melebihi kekuatan jembatan yang hanya mampu menahan 40 ton dengan toleransi beban maksimal 70 ton. Di Jembatan Tol Cisomang, beban kendaraan berat mempercepat kerusakan jembatan.

Memang, beban berlebih bukan penyebab tunggal. Ada faktor lain, seperti usia jembatan yang mungkin sudah tua dan persoalan perawatan jembatan secara berkala. Namun, variabel yang nyaris selalu ada dalam setiap insiden tersebut adalah kendaraan dengan beban berlebih.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pernah meneliti untuk menguji beban kendaraan jenis truk yang lewat di beberapa jembatan di ruas jalan nasional. Hasilnya, 65 persen truk memuat beban melebihi kapasitas.

Persoalannya, daya rusak truk dengan beban berlebih bukan linier, melainkan pangkat empat. Misalnya, kelebihan beban dua kali dari seharusnya berdaya rusak terhadap jalan dan jembatan sebesar dua pangkat empat atau 16 kali lipatnya.



tan sebesar dua pangkat empat atau 16 kali lipatnya.

### Biaya

Saat ini truk memang masih menjadi andalan angkutan logistik. Di Jawa, 90 persen angkutan logistik menggunakan truk. Kemam-



HERYUNANTO

puannya membawa barang dari titik awal menuju titik akhir tanpa perlu berpindah moda angkutan menjadikan truk lebih unggul dibandingkan dengan moda lain.

Akan tetapi, sebagian besar truk mengangkut muatan yang melebihi kapasitasnya. Kendaraan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat mengangkut beban lebih banyak. Dengan cara demikian, ongkos bisa ditekan.

Meski angkutan truk dinilai efisien, sebenarnya tetap ada biaya yang harus dibayar di sisi yang lain. Kerusakan jalan dan kerusakan jembatan menjadi lebih sering. Akibatnya, biaya untuk perbaikan menjadi lebih besar. Efisiensi yang dinikmati pemilik angkutan truk dan pengguna jasa sebenarnya tidak gratis karena menimbulkan biaya di sisi yang lain, terutama waktu dan pajak yang dibayar masyarakat.

Namun, masalah ini seolah dibiarkan tanpa ada pencegahan yang lebih sistematis. Insiden jembatan ambles atau roboh menjadi bukti pembiaran yang terus terjadi. Bahkan, dalam beberapa kasus di jalan tol, truk dengan muatan berlebih akan berjalan lambat dan menimbulkan kecelakaan karena tertabrak dari belakang. Nyawa pun melayang.

Idealnya, pemeriksaan truk dilakukan sejak di kawasan industri atau di awal pengangkutan, bukan di tengah jalan seperti yang dilakukan di jembatan timbang saat ini. Dengan pemeriksaan truk di awal perjalanan, kelebihan muatan—yang menyebabkan kelebihan beban—bisa langsung dibongkar dan diturunkan. Jika ditilang tanpa mengurangi muatan, kerusakan jalan atau jembatan tetap terjadi.

Memang tidak mudah membenahi persoalan ini. Sebab, jembatan timbang dituntut memiliki lahan sebagai tempat muatan diturunkan. Di sisi lain, agar biaya logistik bisa ditekan, infrastruktur pendukung harus mumpuni sampai ke pelosok daerah. Selain itu, diperlukan pula ketegasan otoritas terkait untuk menegakkan hukum.

Jika berbagai hal itu tidak dilakukan, insiden jembatan ambles atau roboh tinggal menunggu waktu. Kondisi ini hanya puncak gunung es dari karut-marut masalah logistik, infrastruktur, dan penegakan hukum di negeri ini.

(NORBERTUS ARYA DWIANGGA)

Judul	Lahan untuk Embung Beralih Fungsi	Tanggal	Kamis, 27 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Pembangunan Embung pengendali banjir di Samarinda terkendala keberadaan permukiman		

## BANJIR SAMARINDA

# Lahan untuk Embung Beralih Fungsi

**BALIKPAPAN, KOMPAS** — Pembangunan lima embung sistem pengendalian banjir di Samarinda, Kalimantan Timur, terkendala keberadaan permukiman, tambang batubara, dan perkebunan sawit. Banjir masih mengancam karena bendungan yang menurut rencana dibangun tahun ini jauh dari target.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III mencatat, permukiman penduduk tersebar di lokasi yang sudah direncanakan sebagai embung dan kolam retensi, seperti Embung Sempaja, Kolam Retensi Damanhuri, dan Embung Bengkuring. Sementara itu, lahan yang direncanakan untuk Embung Muang sudah menjadi tambang batubara, sedangkan lokasi untuk Embung Pampang Kanan menjadi perkebunan sawit.

Kondisi itu membuat realisasi pembuatan penampungan pengendali banjir tersendat. Tahun ini, BWS Kalimantan III hanya bisa membangun embung serbaguna Sempaja seluas 0,7 hektar dengan nilai kontrak Rp 7,8 miliar.

"Pengerjaan sudah dimulai

Selasa (25/6/2019). Daya tampung airnya 27.000 meter kubik. Sementara di wilayah Sempaja butuh penampungan untuk 500.000 meter kubik air agar terhindar banjir," ujar Kepala BWS Kalimantan III Anang Muchlis, Rabu (26/6).

Tahun ini, volume banjir di Sempaja mencapai 1,1 juta meter kubik. Pembangunan embung di satu titik dengan daya tampung minim tidak maksimal mengendalikan banjir.

Selain membuat embung, BWS Kalimantan III juga mulai mengeruk sedimen Bendungan Lempake. Saat ini, volume bendungan itu hanya 676.000 meter kubik. Padahal, daya tampung maksimalnya 1,5 juta meter kubik air. Pengerukan ini diharap mengurangi limpahan air di hulu Sungai Karang Mumus yang meluap saat hujan.

Anang mengatakan, sistem pengendalian banjir itu perlu dibuat sesuai rencana agar saling mendukung. Prinsip pengendalian banjir yang dibuat sejak 2005 di Samarinda adalah menahan air hujan di banyak

titik dan dikeluarkan perlahan agar tidak langsung melimpah ke Sungai Karang Mumus yang membelah Samarinda.

### Sosialisasi

Saat ini, Pemkot Samarinda masih sosialisasi di lokasi yang akan dijadikan embung. Sistem ganti rugi rumah dan bangunan masih dikaji.

"Penyuratan sedang kami lakukan untuk 2.500 rumah yang akan terdampak. Skema pembiayaan relokasi sedang kami bahas juga dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Tahun ini, itu target kami," ujar Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin.

Sebagian rumah itu ada di bantaran Sungai Karang Mumus. Pembangunan permukiman yang tak terkendali di sempadan sungai ini menambah jumlah korban banjir setiap tahun lebih dari 50.000 jiwa.

Pembangunan embung dan pengerukan bendungan Samarinda menggunakan APBN. Tahun ini, APBN untuk pengendalian banjir Samarinda Rp 16,7 miliar. (CIP)

Judul	Revitalisasi Butuh Kolaborasi Lintas Sektor	Tanggal	Kamis, 27 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Untuk penanganan Danau Limboto di Gorontalo yang terancam hilang menjadi daratan akibat sedimentasi yang terus terjadi tak teratasi		

## LINGKUNGAN DANAU LIMBOTO

# Revitalisasi Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

**GORONTALO, KOMPAS** — Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo terancam hilang menjadi daratan dalam beberapa tahun jika sedimentasi yang terus terjadi tidak diatasi. Semua pihak yang terlibat dalam revitalisasi danau kritis itu diimbau terus menjalankan tugas secara simultan dan bersinergi.

Kepala Hubungan Masyarakat Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II Olden Winarto mengatakan, sejak 2012 hingga 2018, revitalisasi berlangsung dalam bentuk pengerukan dasar danau dan pembersihan eceng gondok. Dibangun pula 13 dam pengendali (sabo dam) di sungai-sungai yang bermuara di Danau Limboto seiring dengan pembuatan Kanal Tapodu dan pintu air.

"Sedimentasi sulit diatasi karena hutan sebagai daerah tangkapan air di daerah hulu rusak. Akibatnya, lumpur selalu terbawa sungai. Upaya revitalisasi terus kami lakukan, tetapi tidak akan ada gunanya kalau tidak ada perbaikan di hulu," kata Olden, Rabu (26/6/2019).

Berdasarkan catatan *Kompas*

### **Sedimentasi sulit diatasi karena hutan sebagai daerah tangkapan air di daerah hulu rusak.**

Olden Winarto

(2/1), laju sedimentasi Danau Limboto mencapai 5.300 ton per tahun. Jika tak segera diatasi, diperkirakan dalam 5-10 tahun ke depan Danau Limboto akan lenyap menjadi daratan.

Menurut Olden, revitalisasi selama 2012-2018 sedikit menurunkan laju menjadi sekitar 4.000 ton per tahun.

Danau Limboto merupakan muara dari 23 sungai. Lima sungai di antaranya termasuk sungai besar, yaitu Sungai Bulota, Biyonga, Alopohu, Me-loopu, dan Marisa. "Sungai Alopohu menjadi penyumbang sedimentasi terbesar. Sepanjang tahun airnya selalu keruh karena sedimen. Kerusakan daerah tangkapan air terjadi di

Kecamatan Tibawa dan Bong-meme," kata Olden.

Sekitar 10 tahun lalu, kelima sungai besar masih membawa debit air sepanjang tahun. Saat musim hujan, air sungai membawa sedimen yang terus mendangkalkan Danau Limboto. Permukaan danau pun semakin menyempit, dari 7.000 hektar pada 1932 menjadi sekitar 2.500 hektar sekarang.

"Karena itu, semua kementerian dan lembaga yang terlibat revitalisasi danau harus menjalankan program sambil berkoordinasi. Percuma kami terus mengeruk dasar danau dan membangun sabo dam kalau tidak ada perbaikan di hulu ataupun di sepanjang daerah aliran sungai," katanya.

### **11 kementerian/lembaga**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gorontalo Budyanto Sidiqi mengatakan, 11 kementerian dan lembaga terlibat dalam revitalisasi Danau Limboto. Di tingkat provinsi, dibentuk Kelompok Kerja Revitalisasi Danau sebagai wadah koordinasi.

Masalah di daerah hulu sungai tak luput dari perhatian utama. Budyanto mengatakan, pemerintah yang dimotori Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan merehabilitasi hutan dan lahan seluas 12.000 hektar di hulu Daerah Aliran Sungai Limboto-Bone Bolongo (DAS LBB).

Bappeda juga mengoordinasi tugas pemerintah kabupaten dan kota hingga desa untuk mengawasi areal penggunaan lain di daerah penyangga hutan, terutama yang dijadikan lahan pertanian dengan kemiringan 30 persen. "Kami minta pemerintah daerah menerapkan pertanian berbasis konservasi, salah satunya dengan *agroforestry*. Lahan-lahan pertanian itulah yang rawan menyebabkan sedimentasi," katanya.

Aktivis lingkungan Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Gorontalo, M Djufryhard, mengatakan, revitalisasi Danau Limboto harus melibatkan masyarakat. Ia juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan penjebak sedimen di sabo dam. (OKA)

Judul	Utamakan Pemenuhan Kebutuhan Sungai	Tanggal	Kamis, 27 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman 20)		
Resume	Penataan kawasan Sungai Ciliwung di Jakarta guna menekan resiko banjir mesti mendahulukan kebutuhan sungai dibanding tempat tinggal di area sungai		

## PENATAAN KAWASAN

# Utamakan Pemenuhan Kebutuhan Sungai

**JAKARTA, KOMPAS** — Penataan kawasan Sungai Ciliwung di Jakarta guna menekan risiko banjir mesti mendahulukan pemenuhan kebutuhan sungai dibandingkan dengan kebutuhan tempat tinggal di area itu. Kebutuhan sungai antara lain untuk berfungsi secara baik sebagai sistem aliran dari hulu di Puncak, Kabupaten Bogor, sampai ke utara Jakarta.

"Memulai program dari sungai, baru ke urbannya, adalah kunci solusi," ucap Dekan Departemen Arsitektur Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich Prof Christophe Girot di sela-sela diskusi "Beyond Resilience: Towards a More Integrated and Inclusive Urban Design", Rabu (26/6/2019), di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat. Acara diselenggarakan International Forum on Urbanism (IFoU) bekerja sama dengan Jurusan Arsitektur Universitas Tarumanagara.

Girot pernah bekerja di Future Cities Laboratory untuk menangani proyek penelitian penataan Ciliwung tahun 2010-2015. Ia menyimpulkan prioritas penataan Sungai Ciliwung dan daerah tangkapan airnya, yaitu mengembalikan area Ciliwung sebagai ruang publik dan koridor alami.

Dengan cara ini, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat tidak hanya akan menekan risiko banjir, tetapi memungkinkan Ciliwung menjadi sumber air bersih bagi Jakarta serta menambah ruang publik Ibu Kota. Panjang Ciliwung 119 kilometer. Lebih kurang lima juta jiwa tinggal di daerah tangkapan air Ciliwung yang seluas 384 kilometer persegi.

Isu yang menjadi ganjalan saat ini adalah permukiman di bantaran sungai yang seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Bahkan, ada rumah-rumah di dalam badan sungai. Banjir adalah keniscayaan di rumah-rumah itu.

Proyek normalisasi sungai, meski dikritik karena mengandalkan pembetonan dinding tepi sungai, menurut Girot, menunjukkan penataan permukiman bisa dilakukan. Hal yang jadi pekerjaan rumah adalah merumuskan penataan sesuai aspirasi warga bantaran Ciliwung. Mengingat lahan bantaran sungai mesti dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, lahan untuk permukiman hasil penataan kemungkinan bakal lebih sempit. Desain yang cocok antara lain bangunan bertingkat.

"Di Bukit Duri (Jakarta Selatan), Pak Sandy (Sandyawan Sumardi) mendampingi warga merancang kampung susun," ujarnya.

Dari survei selama penelitian, lanjut Girot, warga di Bukit Duri, Kampung Melayu, dan wilayah sekelilingnya menyatakan ingin lingkungan sekitar Ciliwung lebih baik. Dengan demikian, masyarakat perlu didorong untuk sadar bahwa kesehatan Ciliwung merupakan tanggung jawab bersama, termasuk mereka yang tinggal di bantaranya.

Di sisi lain, Girot mendorong adanya keputusan politik tidak hanya dari kepala daerah, tetapi juga presiden, untuk membenahi Ciliwung. Ini lantaran Ciliwung melewati, antara lain, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Jakarta. "Keputusan presiden adalah satu-satunya solusi," katanya.

Peneliti dan salah satu pendiri School of Democratic Economics, Hendro Sangkoyo, menambahkan, selama ini aksi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melestarikan daerah aliran sungai Ciliwung terkesan tidak sungguh-sungguh. "Pembongkaran vila di Puncak, misalnya, sudah ada sejak Pak Emil Salim jadi Menteri (Lingkungan Hidup), tetapi kan hanya beberapa yang dirobohkan, dan tidak ada artinya untuk krisis di seluruh daerah tangkapan air Ciliwung," tutur Hendro.

Terkait upaya penataan Ciliwung, Hendro menekankan, pemerintah dan pemerintah daerah tidak boleh meninggalkan sistem pengetahuan asli dari masyarakat lokal, tidak sekadar mengandalkan pengetahuan dan teknologi dari luar. (JOG)

Judul	<b>Bappenas: Beban Jakarta Terlalu Berat</b>	Tanggal	Kamis, 27 Juni 2019
Media	Republika (Halalamn 4)		
Resume	Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa akan mengancam ketahanan pangan Indonesia		

# Bappenas: Beban Jakarta Terlalu Berat

● RR LAENY SULISTYAWATI

**Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa akan mengancam ketahanan pangan Indonesia.**

JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan alasan perlunya memindah ibu kota Indonesia di Jakarta ke luar Pulau Jawa. Bambang mengatakan, fakta bahwa Jakarta menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa, serta pusat migrasi yang semuanya mengarah ke Jakarta.

"Juga akan semakin menciptakan beban yang luar biasa terhadap Jakarta," kata Bambang, dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan, Smart, Green and Beautiful di Jakarta, Rabu (26/6). Hal tersebut membuat Jakarta semakin susah terbebas dari masalah kemacetan, banjir, dan kualitas air sungai yang 96 persen tercemar berat.

Bambang mengungkapkan, masalah kemacetan berimbas pada kerugian ekonomi yang mencapai Rp 56 triliun, menurut studi yang dibuat pada 2013. Sistem pengelolaan transportasi yang sangat buruk menyebabkan kemacetan parah. Selain itu, Pulau Jawa juga mengalami krisis keter-

sediaan air, terutama di Jakarta dan Jawa Timur. Hal tersebut juga akan memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Itu sebabnya, lanjut Bambang, Ibu Kota negara sudah sepatutnya pindah ke lokasi yang lebih sentris. "Kita ingin memiliki ibu kota yang benar-benar inilah ibu kota Indonesia, Indonesia yang sentris," kata Bambang.

Kemudian, Bambang juga menyebutkan, alasan perlunya memindah ibu kota ke luar Pulau Jawa adalah karena sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, menurut dia, akan mengancam ketahanan pangan Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa, akibat konversi lahan yang mengurangi lahan pertanian.

Melihat dari sisi ekonomi, Bambang menyebut, setidaknya proses pembangunan ibu kota baru bakal mendorong pertumbuhan sekitar 0,1 persen. "Kami melakukan penghitungan dampak pemindahan ibu kota terhadap perekonomian nasional, ini akan menambah riil produk domestik bruto nasional 0,1 persen," kata Bambang. Bambang mengatakan, pembangunan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan karena bakal menimbulkan kegiatan penggunaan sumber daya potensial yang selama ini belum digunakan. Terlebih, sumber daya alam yang saat ini dimiliki di sekitar Kalimantan yang kemungkinan besar dipilih sebagai lokasi pemindahan.

Geliat pembangunan ibu kota ba-

”

**Kita ingin memiliki ibu kota yang benar-benar inilah ibu kota Indonesia, Indonesia yang sentris.**

ru, lanjut Bambang, juga bakal memacu kegiatan perekonomian di sekitar wilayah Kalimantan. Terutama di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. "Jadi, memang lokasi itu menjadi penting, semakin strategis lokasinya, semakin besar pula dampaknya," ujarnya.

Meski demikian, Bambang menjelaskan, kontribusi sebesar 0,1 persen itu tergolong kecil. Saat ini, total produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar Rp 15 ribu triliun. Oleh karena itu, dengan pertumbuhan 0,1 persen, menyumbang PDB sekitar Rp 15 triliun. Pemerintah memastikan, pemindahan ibu kota tidak akan menyebabkan kontraksi ekonomi di luar wilayah pembangunan.

Pembangunan ibu kota baru diprediksi bakal mendorong laju inflasi secara nasional. "Pemindahan ibu kota bisa menyebabkan inflasi. Tapi, tambahan inflasinya kemungkinan relatif kecil atau sangat minimal," kata Bambang. Berdasarkan penghitungan Bappenas, Bambang menuturkan, pembangunan ibu kota diperkirakan

bakal menyumbang kontribusi inflasi sebesar 0,2 persen. Dengan kata lain, jika rata-rata inflasi nasional dalam kondisi normal sebesar 3,50 persen, akan bertambah menjadi 3,70 persen.

Menurut Bambang, penambahan inflasi sekitar 0,2 persen masih dapat ditoleransi. Sebab, inflasi di kisaran 3-4 persen termasuk inflasi yang sangat rendah sejak beberapa tahun terakhir. "Masih bisa ditolerir dan dampaknya relatif minimal," ujar Bambang. Kendati demikian, Bambang mengatakan, di tengah inflasi yang meningkat, kondisi itu akan disertai dengan peningkatan perdagangan antarwilayah. Bukan hanya antarkota dan provinsi, melainkan juga antarpulau.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Djati Witjaksono Hadi, mengatakan, pihaknya meminta pemerintah tidak mengorbankan lahan konservasi dialihkan jadi lokasi permukiman. "Diupayakan kalau memang menetapkan ibu kota baru di Kalimantan Tengah (Kalteng), bangun permukiman diluar lahan konservasi," kata Djati, di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa malam.

Djati menyadari, kebijakan pemerintah mengenai hal ini bisa mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk yang pindah ke ibu kota baru di Kalteng, dan dibutuhkan lahan untuk permukiman baru. Namun, bukan berarti keputusan ini mengorbankan lahan konservasi. ■ dedy darmawan nasution/antara ed: nora azizah

Judul	<b>Elevasi Waduk Turun Ribuan Ha Padi Puso</b>	Tanggal	Kamis, 27 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 11)		
Resume	Sejumlah daerah mengalami kekeringan serius, tanaman padi dilaporkan lebih dari 2000 hektare puso		

# Elevasi Waduk Turun Ribuan Ha Padi Puso

*Kemarau tahun ini belum mencapai puncaknya, tetapi di sejumlah daerah mengalami kekeringan serius. Tanaman padi dilaporkan lebih dari 2.000 hektare (ha) puso.*

**AGUS UTANTORO**  
 agus\_utantoro  
 @mediaindonesia.com

**D**AMPAK kemarau menyebabkan Waduk Sermo di Kabupaten Kulonprogo mengalami penurunan elevasi. Koordinator Lapangan Pengelola Waduk Sermo Novika Prabowo mengatakan, dari data *monitoring* level muka air Waduk Sermo, tingkat elevasi pada awal Juni 2019 berkisar 132 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kondisi itu terus menurun dan saat ini pada level 131,13 mdpl. "Ini karena rendahnya curah hujan," jelasnya.

Dikatakan, dengan penurunan elevasi ini, volume air di waduk tersebut juga menyusut dari 20 juta meter kubik pada saat elevasi tinggi 136 mdpl, menjadi 1,5 juta

meter kubik pada elevasi 131,13 mdpl.

Novika meyakini, selama elevasi air belum mencapai 124 mdpl batas bawah normal, Waduk Sermo tidak akan kekurangan air untuk memenuhi suplai ke daerah irigasi. Dia juga memastikan, saat ini elevasi air di waduk itu masih dalam kondisi normal.

Namun, jika kemarau berlangsung lama, akan ada penyesuaian suplai air irigasi ke lahan sawah.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku pihaknya sudah memantau kondisi di sejumlah waduk, seperti Cirata dan Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan hasil pantauan, menurutnya, fungsi kedua waduk tersebut masih berjalan baik.

## Lahan padi puso

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul Bambang Wisnu Broto menyebutkan, terdapat 1.918 hektare padi di wilayahnya gagal panen dan dinyatakan puso. Tersebar di 10 kecamatan, yang paling luas di Kecamatan Semin yang mencapai 505 hektare.

Bambang menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan ke pemerintah pusat dan dijanjikan mendapatkan bantuan benih untuk 1.800 hektare serta akan mendapat bantuan dari BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Yogyakarta.

Menurut dia, gagal panen itu sebabkan di Gunungkidul sudah tidak mengalami hujan sejak memasuki April hingga kini.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Hendi Jatnika menyebutkan, ada 8.644 hektare lahan pertanian di wilayahnya mengalami kekeringan saat ini. Daerah yang paling terdampak berada di utara, seperti Majalengka, Indra-

mayu, dan Cirebon yang banyak lahan pertanian padi. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Indramayu menjadi yang paling parah karena terdapat 1.456 hektare yang sudah tidak menerima pasokan air.

"Kedua, Majalengka (1.266 hektare) dan Cirebon (811 hektare)," kata Hendi. Selain di daerah tadi, menurutnya, kekeringan pun terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota.

Di Tegal, Jawa Tengah, bantuan air bersih dari PMI ke lokasi kekeringan langsung diperebutkan warga. Seperti di Desa Kertasari, Kecamatan Surodadi, mereka berebut air bersih dengan membawa ember atau penampung air lainnya. Bantuan air bersih tersebut sangat ditunggu-tunggu karena sejak Mei kekeringan dan krisis air bersih.

Kemarau juga menyebabkan lima hektare lahan di Ogan Ilir, Sumsel, terbakar. Asap pekat mengganggu pendedara di Tol Palindra karena lokasinya berdekatan dengan jalan tersebut. (BY/BB/JI/AT/DW/DG/RF/AD/YK/N-2)